

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh**

**Muhammad Azizan Habibi**

Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan tahun 2025 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 direspons oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui penyesuaian APBD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pergeseran APBD. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait pelaksanaan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pelayanan publik, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kepada pengguna layanan di dua instansi terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Lampung Tengah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Pelayanan tetap berjalan normal dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat meskipun terjadi penyesuaian anggaran. Namun demikian, efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, sehingga menurunkan tingkat kenyamanan masyarakat dalam proses memperoleh layanan. Meskipun terdapat keterbatasan fasilitas, instansi pelayanan publik tetap dapat menjalankan fungsi utamanya, seperti kemampuan pelayanan kependudukan yang masih mampu memproses pencetakan beberapa dokumen penting dalam waktu relatif singkat.

**Kata Kunci:** Efisiensi Anggaran, Pelayanan Publik, Kebijakan Pemerintah

## **ABSTRACT**

### ***BUDGETARY EFFICIENCY POLICY FOR PUBLIC SERVICES IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY***

***By***

**Muhammad Azizan Habibi**

*The budget efficiency policy implemented in 2025 through Presidential Instruction Number 1 of 2025 and Minister of Finance Regulation Number 56 of 2025 was responded to by the Central Lampung Regency Government through adjustments to the Regional Budget based on Regional Regulation Number 4 of 2025 concerning Amendments to the Regional Budget and Regent Regulation Number 5 of 2025 concerning the Implementation of Budget Shifts. This situation raises issues related to the implementation of budget efficiency and its impact on public services, particularly within the Investment and One-Stop Integrated Services Office and the Population and Civil Registration Office. The research formulates two main problems: 1. How is the budget efficiency policy implemented in relation to public services in Central Lampung Regency? 2. What are the supporting and inhibiting factors in the implementation of the policy?*

*This study employs a juridical-empirical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews and questionnaires distributed to service users in the two related agencies, while secondary data were collected from legislation and budget documents. The data were analyzed descriptively and qualitatively by comparing legal provisions with field findings.*

*The results of the study indicate that the budget efficiency policy implemented in Central Lampung Regency does not affect the quality of public services received by the community. Public services continue to operate normally and are able to meet the basic needs of the community despite adjustments to the budget. Nevertheless, budget efficiency has led to a reduction in supporting facilities and infrastructure, which in turn has decreased the level of comfort experienced by the public during the service process. Despite these limitations in facilities, public service institutions remain capable of carrying out their core functions, as evidenced by the ability of population administration services to process the issuance of several essential documents within a relatively short period of time.*

**Keywords:** *Budget Efficiency, Public Service, Government Policy*